

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Barang dan Jasa Publik

Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorangpun bersedia menghasilkan atau barang tersebut dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah terbatas, misalnya pertanahan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik yang mempunyai dua karakteristik utama yaitu, *non-rivalry* (tidak bersaing) dan *non exclusion* (tanpa pengecualian.). Karakteristik *non-rivalry* (tidak bersaing) terjadi apabila konsumsi yang dilakukan seseorang tidak akan mengurangi tersedianya barang atau jasa itu bagi seseorang atau sekelompok orang lain untuk turut mengkonsumsinya, ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan barang swasta atau privat goods, dimana untuk jenis barang ini bila seseorang telah mengkonsumsinya, maka tersedianya barang tersebut bagi orang lain akan berkurang, dalam hal ini akan berlaku "*rivalri principle*".

Sedangkan yang dimaksud dengan *non exclusion* adalah barang atau jasa yang penyediannya tidak dapat dibatasi oleh orang-orang yang bersedia atau jasa yang penyediannya tidak dapat dibatasi oleh orang-orang yang bersedia membayarnya. Barang-barang dan jasa-jasa yang demikian itu dapat ditarik dari konsumsi apabila ada sebagian orang individu yang menolak untuk membayarnya. Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni, maka

pemerintah yang harus menghasilkan agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan. Pihak swasta menghasilkan mobil, akan tetapi apabila produksi mobil tertentu tidak dapat diimbangi oleh pembangunan jalan pemerintah, maka kesejahteraan masyarakat tidak mencapai optimum. Setiap barang dan jasa mengandung harga, harga tersebut ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.

Pelayanan jasa-jasa dapat diutamakan sebagai barang dan barang jasa ini bisa mencakup barang-barang publik (*public goods*) dan barang swasta (*private goods*). Bila barang-barang dan jasa-jasa tersebut masuk dalam kategori *private goods* tetapi merupakan bagian dari jasa-jasa publik, maka disebut *publicity provided private goods*, atau barang-barang swasta yang disediakan negara, misalnya pangan yang merupakan barang swasta diintervensi pemerintah melalui Bulog, penetapan harga-harga dasar dan lain-lain, tetapi tetap saja jutaan petani bergerak dan turut berinteraksi dengan pemerintah dalam menyediakan barang-barang yang amat penting bagi kebutuhan pokok.

## **B. Peran Pemerintah**

Setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peran penting. Peran pemerintah sangat besar dalam perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam perekonomian kapitalis murni yang dikemukakan oleh Adam Smith.

Adam Smith mengemukakan teori pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi (Suherman Rosyidi, 1998 : 73).

1. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Fungsi pemerintah untuk menjalankan peradilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya jalan, dam-dam, dan sebagainya.

Ada beberapa pendekatan yang menjelaskan apakah suatu kegiatan ekonomi berada disektor negara maupun sektor swasta, pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan yang memperkenalkan tindakan pemerintah hanya bilamana sektor swasta tidak sanggup melaksanakannya.
2. Pendekatan yang memberikan peranan yang lebih aktif kepada pemerintah.

Menurut Kaum Klasik yang penting bagi pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan individu, apakah itu baik atau buruk, tetapi pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak/belum pernah dikerjakan oleh sektor swasta baik secara perorangan maupun bersama-sama. Pemerintah semakin perlu ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi karena mekanisme pasar yang dianut oleh sistem kapitalis murni memiliki beberapa kelemahan. Pada dasarnya kelemahan tersebut timbul karena :

1. Adanya barang-barang publik.
2. Perbedaan biaya private dan biaya sosial, serta manfaat private dan manfaat sosial.
3. Adanya resiko yang sangat besar.
4. Sifat-sifat monopoli.
5. Adanya inflasi dan deflasi.
6. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata.

Kegiatan pemerintah tidaklah hanya dibatasi oleh situasi dimana pasar swasta tidak dapat bekerja, melainkan adalah peran yang lebih penting, yaitu :

1. Peran alokasai, yaitu peran pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Peran distribusi.
3. Peran stabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu aktivitas yang dapat digolongkan sebagai aktivitas pemerintah adalah kegiatan dalam menggolongkan faktor-faktor produksi maupun barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pemerintah daerah dimana peran pemerintah Kota Bandar Lampung adalah menyediakan barang publik guna memenuhi dan memuaskan kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung. Salah satu peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyediakan barang publik yaitu dengan adanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Way Rilau sebagai Perusahaan Daerah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis khususnya untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Selain bertujuan memberikan pelayanan penyediaan air bersih PDAM Way Rilau merupakan salah satu perusahaan daerah sebagai penyumbang sumber keuangan daerah.

### **C. Sumber Keuangan Daerah**

Dalam pemerintahan suatu negara, pemerintah mempunyai peran dalam perekonomiannya. Menurut Adam Smith peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam :

- a. Peran Alokasi yaitu merupakan merupakan fungsi pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dana agar lebih optimal penggunaannya.
- b. Peran Distribusi yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk menyesuaikan pembagian pendapatan dan mensejahterakan masyarakat.
- c. Peran Stabilitas yaitu merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang mantap. (Guritno Mangkoesebroto, 1993 : 2).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa, (1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah. (2) Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada sebuah sistem pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah.
  - b. Hasil retribusi daerah.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dinas Pendapatan Daerah memiliki peran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), beberapa kebijakan peningkatan PAD adalah :

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah
 

Menghimpun seluruh potensi yang ada baik pajak maupun retribusi yang dikelola oleh Dinas/Instansi pengelola PAD. Mengintensifikaikan pungutan dan penyeteroran pungutan PAD dari Dinas/Instansi pengelola ke kas daerah.

Meningkatkan frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi, sehingga pencapaian target oleh masing-masing unit pengelola dapat dipantau.

Melakukan pertukaran informasi dengan Dinas Pendapatan seluruh Indonesia untuk dapat mengetahui upaya dan terobosan dalam peningkatan PAD.
2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
 

Berupaya memperluas jaringan pelayanan baik pajak maupun retribusi.

Melakukan penggalan dan pengembangan sumber-sumber pungutan yang

dapat dijadikan objek pungutan, baik retribusi daerah, pajak, dan pendapatan lain-lain.

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sekaligus melakukan pembinaan terhadap aparat pelaksanaan pemungutan PAD.
4. Melaksanakan pelayanan prima dengan mutu dan kualitas terbaik.
5. Membuat jaringan kerja yang lebih baik.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1986 : 53), sumber-sumber keuangan daerah meliputi :

1. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perizinan dan lain-lain.
3. Pendapatan daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
4. Penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat daerah tentang hal ini masing-masing daerah berbeda persentasenya.
5. Penerimaan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan instruksi Presiden.
6. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup baik pula. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara yaitu :

1. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah.
4. Menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

#### **D. Badan Usaha Milik Daerah**

Pemerintah daerah diseluruh dunia mendirikan perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas dasar pertimbangan :

1. Menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat.
2. untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hal monopoli alami seperti angkutan umum atau telepon.
3. Dalam rangka mengambil alih perusahaan asing.
4. Untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat dan menembus biaya swasta untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah.

Greytak dalam Nick Devas (1989 : 111) mengemukakan tiga syarat untuk perusahaan daerah atau tiga pertimbangan yang dapat membantu dalam memilih calon bidang untuk perusahaan daerah yaitu :

1. Tenaga pelaksanaan dan pembukuan harus dipisahklan agar layanan dapat diberikan secara efisien. Pemisahan ini dapat memberikan peluang yang lebih besar pada tenaga pelaksana untuk bertindak leluasa dalam hal yang menyangkut dengan penentuan harga, produksi, pegawai, dan sebagainya, juga dapat menjamin tanggungjawab yang lebih besar dari pihak pelaksana, dan tingkat hasil dapat dengan mudah dipantau melalui pembukuan sendiri-sendiri.
2. Barang yang dihasilkan harus laku dijual. Ini berarti barang itu harus dapat diuraikan ke dalam satuan-satuan konsumsi, dan sebagian besar manfaat konsumen haruslah bermanfaat untuk perorangan dan bermanfaat untuk masyarakat.
3. harus ada kemungkinan menembus biaya dengan cara menetapkan harga barang bersangkutan dalam kaitan dengan biaya.

Pendirian perusahaan daerah di Indonesia atas pertimbangan untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat dan/atau menebus biaya serta untuk menghasilkan penerimaan bagi pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disumbangkan ke kas daerah.

Menurut Josef Riwo Kaho (1988 : 25), fungsi pokok dari perusahaan daerah adalah pertama, sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi perkembangannya perekonomian daerah. Kedua, sebagai penghasil pendapatan daerah. Hal ini berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetor ke kas daerah. Namun sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi memberikan jasa atau kemanfaatan umum.

#### **E. Kepuasan Pelanggan**

Perlu disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan. Pelanggan pada saat ini berbeda pada pelanggan pada masa silam dimana pelanggan sekarang lebih terdidik dalam dan menyadari hak-haknya. Oleh karena itu pernyataan yang berlaku bahwa tidak realistis bahwa bila perusahaan mengharapkan tidak ada pelanggan yang tidak puas. Namun perusahaan harus bisa meminimalkan ketidakpuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang semakin hari semakin baik. Dan pada saat bersamaan, perusahaan perlu memperhatikan konsumen.

Konsep kepuasan pelanggan sebenarnya bersifat abstrak. Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses sederhana. Komplek, atau keduanya, komplek dan rumit. Dalam hal ini peranan setiap individu dalam service encounter sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara lebih baik, maka perlu dipahami sebab-sebab

kepuasan. Pelanggan hanya lebih banyak kecewa pada jasa daripada barang tetapi mereka juga jarang mengeluh. Salah satu alasannya adalah karena mereka juga ikut terlibat dalam proses pencapaian jasa.

Definisi kepuasan pelanggan menurut D. K Tse P.C Wilton (Leo Agung Setiawan, 1998 : 9) dalam *Models of Consumer Satisfaction Formation*, menyatakan kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelum dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian.

Umumnya harapan pelanggan adalah merupakan perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang diterimanya apabila ia membeli atau mengkonsumsi produk, sedangkan kinerja yang didapatkan adalah persepsi pelanggan terhadap apa yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli. Pelanggan mengeluh karena tidak puas, dengan demikian semakin tinggi harapan para pembeli seseorang pelanggan maka semakin besar kemungkinan ia tidak puas terhadap jasa yang dikonsumsinya. Dalam hal ketidakpuasan menurut Leo Agung Setiawan (1980 : 10) ada beberapa kemungkinan tindakan yang bisa dilakukan pelanggan. Yaitu,

1. Tidak melakukan apa-apa.

Pelanggan yang tidak puas tidak melakukan komplain, tetapi mereka praktis akan membeli atau menggunakan jasa perusahaan itu kembali.

2. Melakukan komplain.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apakah pelanggan yang tidak puas akan melakukan komplain atau tidak yaitu :

- Derajat kepentingan konsumsi uang dilakukan. Hal yang menyangkut derajat pentingnya jasa yang dikonsumsi dan harapan bagi konsumen, waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi jasa, serta sosial visibility. Apabila derajat kepentingan, biaya dan waktu yang dibutuhkan relatif tinggi maka kuat kecenderungan bahwa pelanggan akan melakukan komplain.
- Tingkat kepuasan pelanggan. Semakin tidak puas seorang pelanggan maka semakin besar kemungkinan melakukan komplain.
- Manfaat yang diperoleh. Apabila manfaat yang diperoleh dari penyampaian komplain besar maka semakin besar pula pelanggan akan melakukan komplain.
- Penyempurnaan produk, yakni perusahaan penyedia jasa kemungkinan akan meningkatkan atau memperbaiki penawarannya.
- Pengetahuan dan pengalaman. Hal ini meliputi pembelian jasa sebelumnya, pemahaman akan jasa, persepsi terhadap kemampuan sebagai konsumen, dan pengalaman komplain sebelumnya.
- Sikap pelanggan terhadap keluhan. Pelanggan yang bersifat positif terhadap penyampaian keluhan biasanya sering menyampaikan keluhan karena ia yakin akan manfaat yang diterimanya.
- Tingkat kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi.
- Peluang keberhasilan dalam melakukan komplain.

## ***F. Willingness To Pay***

### **1. Pengertian *Willingness to Pay***

Willingness to Pay (WTP) adalah besarnya nilai yang mau dibayar suatu individu atau suatu kelompok terhadap suatu barang atau jasa. Pendekatan WTP dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk mencari nilai maksimum yang mau dibayar terhadap suatu benefit yang akan diperoleh.

(<http://www.economicglossary.com>). Sedangkan menurut Tamin (1999) WTP adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan atas jasa yang diperolehnya.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis WTP didasarkan pada persepsi penggunaan terhadap tarif dari jasa tersebut.

WTA adalah nilai kegunaan awal dari barang dan jasa sebelum ada perubahan atau kesediaan individu untuk menerima kompensasi bila barang dan jasa tersebut dimanfaatkan oleh individu lain atau diubah pemanfaatannya.

Pemilihan penggunaan konsep WTP dan WTA dalam menilai sumber daya berkaitan erat dengan suatu kepemilikan sumber daya (property right). WTA untuk kompensasi kehilangan hak penguasaan menjadi lebih relevan dari pada WTP. Secara umum konsep WTP digunakan dalam situasi dimana penggunaan sumber daya tidak secara jelas memiliki sumber daya tersebut.

Terdapat bermacam-macam teknik penilaian dapat digunakan untuk mengkuantifikasikan konsep dari nilai. Konsep dasar dalam penilaian ekonomi yang mendasari semua teknik adalah kesediaan membayar dari individu untuk barang- barang dan jasa-jasa atau sumber daya (Munasinghe, 1993).

Teknik penilaian manfaat, didasarkan pada kesediaan konsumen membayar perbaikan atau kesediaan menerima kompensasi dengan adanya kemunduran kualitas dalam sistem (Hufschmidt et al. 1987). Kesediaan membayar atau kesediaan menerima merefleksikan preferensi individu, kesediaan membayar dan kesediaan menerima adalah “bahan mentah” dalam penilaian ekonomi (Pearce dan Moran, 1994).

Pearce dan Moran (1994) menyatakan kesediaan membayar dari masyarakat  $i$  untuk perubahan dari kondisi lingkungan awal ( $Q_0$ ) menjadi kondisi lingkungan yang lebih baik ( $Q_1$ ) dapat disajikan dalam bentuk fungsi, yaitu :

$$WTP_i = f(Q_1 - Q_0, P_{own, i}, P_{sub, i}, S_i)$$

Keterangan :

$WTP_i$  = Kesediaan membayar dari masyarakat ke  $i$   
 $P_{own}$  = Harga dari penggunaan sumber daya lingkungan  
 $P_{sub, i}$  = Harga substitusi untuk penggunaan sumber daya lingkungan  
 $S_i$  = Karakteristik sosial ekonomi masyarakat ke  $i$

Kesediaan membayar berada pada era dibawah kurva permintaan (Munangsiha, 1993). Kurva permintaan mengukur jumlah yang akan dibayar oleh konsumen untuk tiap unit yang dikonsumsi (Samuelson dan Nordhaus, 1990). Kurva permintaan merupakan jadwal keinginan konsumen untuk membayar jumlah sumber daya yang dikonsumsi (McNeely, 1998).

Total bidang kurva permintaan (OREM) menunjukkan total utilitas yang diperoleh atas konsumsi suatu barang atau merupakan ukuran kemampuan membayar total (Hufschmidt et al, 19987 : James, 1991), karena jumlah tersebut adalah hasil penjumlahan nilai-nilai marginal  $Q$  dari 0 sampai  $M$ , dengan mengurangi biaya suatu barang bagi konsumen (ONEM), nilai surplus

konsumen ditunjukkan sebagai bidang segitiga NRE (Samuelson dan Nordhaus, 1990) dan merupakan sebagai bidang segitiga NRE (Samuelson dan Nordhaus, 1990) dan merupakan ukuran kemauan membayar di atas pengeluaran kas atau konsumsi (Hufschmidt, *et al*, 1987).

Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli untuk suatu produk dan kesediaan untuk membayar (Samuelson dan Nordhaus, 1990 : Pomeroy, 1992). Surplus konsumen timbul karena konsumen menerima lebih dari yang dibayar dalam bonus ini berakar pada hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Sebab timbulnya surplus konsumen, karena konsumen membayar untuk tiap berdasarkan nilai unit terakhir. Surplus konsumen mencerminkan manfaat yang diperoleh karena dapat membeli semua unit barang pada tingkat harga rendah yang sama (Samuelson dan Nordhaus, 1990).

Pada pasar yang berfungsi dengan baik, harga pasar mencerminkan nilai marginal, seperti unit terakhir produk yang diperdagangkan (Pomeroy, 1992). Secara sederhana, surplus konsumen dapat diukur sebagai bidang yang terletak diantara kurva permintaan dan garis harga (Samuelson dan Nordhaus, 1990).

Konsumen mengkonsumsi sejumlah barang  $M$ , seseorang akan mau membayar harga yang mencerminkan faedah marginal pada tingkat konsumsi. Dengan melihat perbedaan dalam jumlah yang dikonsumsi, kemauan seseorang akan membayar, berdasarkan fungsi faedah marginal dapat ditentukan. Hasilnya adalah kurva permintaan individu untuk  $Q$ . Karena faedah berlereng turun ke kanan (negatif), maka demikian kurva permintaannya. Kurva permintaan ini dikenal dengan nama Kurva Permintaan Marshal. Digunakan kurva permintaan

Marshal, karena kurva permintaan tersebut dapat diestimasi secara langsung dan mengukur kesejahteraan melalui surplus konsumen, sedangkan kurva permintaan Hicks mengukur kesejahteraan melalui kompensasi pendapatan.

## **2. Nilai Ekonomi Sumber Daya**

Secara tradisional nilai terjadi didasarkan pada interaksi antara manusia sebagai subjek atau penilaian dan objek atau sesuatu yang dinilai (Pearce dan Moran, 1994). Setiap individu memiliki sejumlah nilai yang dikatakan sebagai nilai penguasaan (*held value*) yang merupakan basis preferensi individu. Pada akhirnya nilai objek ditentukan oleh bermacam-macam nilai yang dinyatakan (*assigned value*) oleh individu (Pearce dan Turner, 1990).

Nilai ekonomi atau total nilai ekonomi suatu sumber daya secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu nilai penggunaan (*use value*) dan nilai intrinsik (*non use value*). Selanjutnya dijelaskan bahwa nilai penggunaan langsung (*direct use value*), nilai penggunaan tidak langsung (*indirect use value*) dan nilai pilihan (*option value*).

Nilai penggunaan diperoleh dari pemnfaatan aktual lingkungan. Nilai penggunaan berhubungan dengan nilai karena responden memanfaatkannya atau berharap akan memanfaatkan dimasa mendatang. Nilai penggunaan langsung barang adalah nilai yang ditentukan oleh kontribusi lingkungan pada aliran produksi dan konsumen.

Nilai penggunaan langsung berkaitan dengan output yang langsung dapat dikonsumsi misalnya makanan, kesehatan, rekreasi (Pearce dan Moran, 1994).

Sedangkan nilai penggunaan tidak langsung ditentukan oleh manfaat yang berasal dari jasa-jasa lingkungan dalam mendukung aliran produksi dan konsumsi.

Nilai pilihan (*option value*) berkaitan dengan pilihan pemanfaatan untuk konservasi sistem lingkungan dan komponen sistem berhadapan dengan beberapa kemungkinan pemanfaatan oleh individu di hari kemudian. Ketidakpastian penggunaan dimasa datang berhubungan dengan ketidakpastian penawaran lingkungan, teori ekonomi mengindikasikan bahwa nilai pilihan adalah kemungkinan positif.

Nilai intirisik dikelompokkan menjadi dua, yaitu : nilai warisan (*bequest value*) dan nilai keberadaan (*existence value*). Nilai intirisik berhubungan dengan kesediaan membayar positif, jika responden tidak bermaksud memanfaatkannya dan tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya (Pearce dan Moran). Nilai warisan berhubungan dengan kesediaan membayar untuk melindungi manfaat lingkungan bagi generasi mendatang. Nilai warisan adalah bukan nilai penggunaan untuk individu penilai, tetapi merupakan potensi penggunaan atau bukan penggunaan di masa datang. Nilai keberadaan muncul karena adanya kepuasan atas keberadaan sumber daya, meskipun penilai tidak ada keinginan untuk memanfaatkannya.

### **3. Faktor-Faktor *Willingness to Pay***

#### **1. Pendapatan per bulan**

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut

menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode.

Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang (Rustam, 2001 : 1).

## 2. Kualitas Air dan Frekuensi (Tingkat) Pemakaian Air Bersih

Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. Untuk memperhitungkan frekuensi, seorang menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan ini dengan jarak waktu. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Frekuensi>)

## **G. Gambaran Umum PDAM Way Rilau**

### **1. Sejarah Singkat PDAM Way Rilau**

Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Bandar Lampung dikelola sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda yaitu sejak tahun 1917 dengan mengusahakan dan memanfaatkan sumber mata air sungai Way Rilau dengan kapasitas produksi 18 liter per detik. Tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat tanjung Karang dan sekitarnya. Setelah Indonesia

merdeka, maka pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dipindah alihkan kepemilikannya dan kemudian dilaksanakan oleh Seksi Air Minum Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Karang - Teluk Betung.

Status perubahan ini belum memenuhi pertumbuhan dan perkembangan seksi air minum, mengingat status kelembagaan belum mendukung untuk menambah modal kerja guna perluasan dan pengembangan jaringan akibat keterbatasan APBD Tingkat II. Untuk mengatasi persoalan ini maka pada tanggal 11 Maret 1976 dikeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1976 yang mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama PDAM Way Rilau Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung.

Dengan adanya perubahan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung menjadi Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung, sesuai dengan Peraturan Daerah No. 24 Tahun 1983, maka Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

## **2. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 269/Kpts/1984 Tanggal 8 Agustus 1984 Tugas Pokok Perusahaan Daerah Air Minum adalah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis. Selain

itu juga, PDAM Way Rilau merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah yang diharapkan dapat menghasilkan tambahan bagi penghasilan Pemerintah Daerah guna menunjang kehidupan maupun pertumbuhan serta pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

### **3. Visi dan Misi PDAM Way Rilau**

#### **◇ Visi**

PDAM Way Rilau sebagai Perusahaan Daerah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata, terus menerus sesuai dengan persyaratan higienis, memiliki Visi “Mewujudkan pelayanan yang baik, efisiensi dalam pengelolaan”.

#### **◇ Misi**

- a. Menyediakan air bersih dengan standar kesehatan secara berkelanjutan dan merata.
- b. Mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan.
- c. Meningkatkan pendapatan.
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **4. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung.**

- a. Pembina**
- b. Dewan Pengawas**

**c. Direktur Utama**

**d. Direktur Bidang Umum membawahi :**

**◇ Kepala Bagian Keuangan membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Anggaran
- Kepala Sub Bagian Penagihan dan Rekening
- Kepala Sub Bagian Akuntansi
- Kepala Sub Bagian Kas

**◇ Kepala Bagian Umum membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Protokol
- Kepala Sub Bagian Pembelian
- Kepala Sub Bagian Pergudangan
- Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Karyawan
- Kepala Sub Bagian Personalia

**◇ Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Humas dan Hukum
- Kepala Sub Bagian Pelayanan Langganan
- Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan
- Kepala Sub Bagian Sekretariat dan Administrasi

**e. Direktur Bidang Teknik membawahi :**

**◇ Kepala Bagian Perencanaan Teknik, membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknik Air Minum dan Pemetaan
- Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan

◇ **Kepala Bagian Produksi, membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Sumber Air dan Transmisi
- Kepala Sub Bagian Pengendalian Kualitas Air dan Laboratorium
- Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Mesin dan Listrik

◇ **Kepala Bagian Distribusi, membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Distribusi dan Penyambungan
- Kepala Sub Bagian Meter Air dan Segel
- Kepala Sub Bagian Penertiban Pelanggan

f. **Kepala Satuan Pengawas Intern, membawahi :**

1. Kepala Sub Pengawas Operasional Bidang Umum
2. Kepala Sub Pengawas Operasional Bidang Teknik

g. **Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pusat Data Elektronik, membawahi :**

1. Kepala Sub Badan Administrasi Umum
2. Kepala Sub Badan Badan Teknik
3. Kepala Sub Badan Pusat Data Elektronik

h. **Staf Ahli, terdiri dari :**

1. Staf Ahli Bidang Umum
2. Staf Ahli Bidang Teknik